

***POLITICAL WILL PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
TERHADAP PELESTARIAN SATWA DI TAMAN NASIONAL TESSO
NILO TAHUN 2011-2012***

By: Achmad Fauzy
Achmad_fauzy76@yahoo.com
Supervisor: Adlin, S.Sos, M.Si
Library of Riau University

Department of Government
Faculty of Social Science and Political Science
University of Riau

Campus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km 12.5 Simp. New Pekanbaru
Phone Fax 0761-63277

ABSTRACT

This study purpose to determine whether there is political will Pelalawan Government Against Wildlife Preservation in Tesso Nilo in 2011-2012. The main problem in this research is how the Political Will of Government Pelalawan Against Wildlife Animals in Tesso Nilo in 2011-2012. How Government Pelalawan willing to take an active role in efforts to Wildlife Animals in Tesso Nilo in 2011-2012.

This study is a qualitative research using descriptive analysis method. This study used an interview with the informant as the object information that aims to achieve the goal in order to obtain the information in the study. The type of data used in this research is primary data and secondary data with obtained and interviews with informants in this study.

Based on the results, it can be concluded that the political will of the Government Pelalawan wildlife conservation in TNNP in 2011-2012 is still lacking even hardly. Theres indicator writers use as a reference to find the political will of the Government of Pelalawan on wildlife conservation in TNNP in 2011-2012, initiatives, priorities, support of mobilitation politic, law enforcement and business continuity. Where all of this indicator did not find the government researchers Pelalawan on wildlife conservation in TNNP in 2011-2012.

Based on the results of the study also found some inhibiting factors in wildlife conservation efforts in TNNP among others, lack of political will Pelalawan District Government, lack of awareness of all parties that animals have a right to life, lack of support or support from the local community and the security area is still not maximum.

Keywords: Political will, Tesso Nilo National Park, indicators of political will

PENDAHULUAN

Tesso Nilo merupakan hutan hujan dataran rendah yang tersisa di Pulau Sumatera. Fungsinya yaitu menjaga keseimbangan ekosistem berbagai komponen yang berkaitan langsung dengan kehidupan manusia sehari-hari. Taman Nasional Tesso Nilo ditetapkan sebagai Taman Nasional pada tanggal 19 Juli 2004) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 255/Menhut-II/2004 Tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kelompok Hutan Tesso Nilo yang Terletak di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu Provinsi Riau Seluas 38.575 (Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam) Hektar Menjadi Taman Nasional Tesso Nilo dan didalam Surat Keputusan Menteri nomor 225 tahun 2004 tersebut memerintahkan kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam untuk melakukan pengelolaan atas Taman Nasional Tesso Nilo maka dibentuklah suatu badan bernama Balai Taman Nasional Tesso Nilo

Ancaman kemerosotan/kepunahan keanekaragaman hayati di Provinsi Riau khususnya keanekaragaman hayati yang hidup di hutan disebabkan oleh berbagai aktifitas manusia antara lain alih fungsi hutan, pembakaran hutan, illegal logging, perambahan hutan konservasi, perburuan satwa liar, konflik satwa dan manusia dan faktor-faktor lain. Qomar (2008) mengungkapkan bahwa interaksi masyarakat dengan hutan alam semakin tinggi melalui praktek pembalakan liar dan perambahan sehingga menimbulkan tekanan besar terhadap ekosistem hutan Tesso Nilo. Tekanan ini menyebabkan berkurangnya habitat flora dan fauna. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana dukungan dari pemerintah daerah dalam menangani permasalahan tersebut..

Kematian satwa dilindungi di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo terus terjadi. Bahkan di tahun 2011-2012 mengalami peningkatan yang cukup

signifikan, seperti kasus kematian gajah Sumatera pada 2012 yang meningkat menjadi 15 dari 5 gajah pada 2011. Kematian gajah sebagian besar akibat diracun karena dianggap sebagai hama yang merusak tanaman perkebunan. Dari 2004 hingga Oktober 2012 menurut catatan WWF terjadi 91 ekor gajah mati di Riau yang sebagian besar disebabkan karena konflik dan perburuan. Namun dari angka tersebut hanya satu kasus yang diproses secara hukum yakni kematian gajah karena perburuan di Rokan Hulu pada Agustus 2005. Dari kasus ini terindikasi bahwa keberadaan satwa dilindungi yang berada di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo ini berada dalam ancaman kepunahan.

Political Will atau keinginan politik yang diartikan sebagai "niatan pimpinan" untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk kebaikan bersama dalam jangka panjang. Keinginan politik (*Political will*) juga diartikan apabila negara mempunyai kemauan, tetapi tentunya harus didukung oleh rakyat. Brinkerhoff (2010) memberikan pengertian secara teoritis, *political will* adalah kesediaan dan komitmen pemimpin politik dalam melakukan tindakan yang bertujuan untuk mencapai seperangkat tujuan yang disertai dengan usaha berkelanjutan.

Political will bukan melakukan penanganan pelestarian satwa sekedar untuk mengeruk keuntungan material, akan tetapi yang dikehendaki adalah benar-benar merupakan niat dan tekad yang tulus untuk melestarikan hutan lindung beserta isinya tanpa reserve atau pamrih. *Political will* ini amat penting, lebih-lebih di tengah perhatian terhadap upaya pelestarian alam dan satwa dilindungi yang saat ini sangat rendah. Tanpa *political will* itu apapun yang akan kita rencanakan semuanya tidak akan membawa hasil yang memuaskan.

Menurut Brinkerhoff (1999), ada beberapa indikator untuk mengukur *political will* pemerintah, yaitu inisiatif pemerintah,

prioritas, mobilisasi dukungan politik, penegakan hukum dan keberlanjutan usaha.

METODE PENELITIAN

Untuk melihat, mengetahui serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan aktual dengan melihat masalah dan tujuan penelitian seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini jelas mengarah pada penggunaan metode penelitian kualitatif.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto (2006: 10) penulisan dengan cara deskriptif yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang dikelilingi dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan atau subjek atau objek penelitian baik seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang benar dan terpercaya.

2. Lokasi penelitian

Lokasi Penelitian ini penulis memfokuskan di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang terletak di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Penulis tertarik untuk meneliti di lokasi ini adalah karena Taman Nasional Tesso Nilo merupakan Taman Nasional yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi.

3. Informan penelitian

Subjek dalam penelitian ini ialah instansi pemerintah yang bertanggung jawab yakni Pemerintah Kabupaten Kabupaten Pelalawan dan instansi terkait Taman Nasional Tesso Nilo. Informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu cara penentuan informan yang ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu.

4. Jenis dan Sumber data

1. Jenis data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan penelitian dengan proses wawancara yang dijadikan objek penelitian mengenai Political will Pemerintah Kabupaten Pelalawan terhadap pelestarian satwa di Taman Nasional Tesso Nilo tahun 2011-2012.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku pendukung, dokumen dan referensi yang berkaitan dengan political will yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan terhadap pelestarian satwa di Taman Nasional Tesso Nilo tahun 2011-2012.

2. Sumber data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

a. Informan

b. Buku

c. Dinas Kehutanan dan Perkebunan

d. Balai TNTN

e. jurnal , laporan ilmiah

5. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka teknik pengumpulan data yang dipakai adalah:

a. Wawancara

Teknik wawancara dilakukan dalam penelitian lapangan karena mempunyai sejumlah kelebihan antara lain, dapat digunakan oleh peneliti untuk lebih cepat memperoleh informasi yang dibutuhkan, lebih meyakinkan peneliti bahwa informan menafsirkan pertanyaan dengan benar, memberikan kemungkinan besar atas keluwesan alam proses pengajuan pertanyaan, banyak pengendalian yang dapat dilatih dalam konteks pertanyaan yang diajukan dan jawaban yang diberikan,

informasi dapat lebih siap diperiksa kesahihannya atas isyarat nonverbal.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan informasi berdasarkan dokumen-dokumen yang ada dari instansi terkait dengan political will yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan terhadap pelestarian satwa di Taman Nasional Tesso Nilo tahun 2011-2012.

6. Teknik analisis data

Bogdan(2008) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisa data dilakukan dengan cara deskriptif yakni menggambarkan dan memaparkan bentuk political will yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan terhadap pelestarian satwa di Taman Nasional Tesso Nilo. Data yang dianalisa merupakan hasil dari observasi secara langsung dan wawancara kemudian menghubungkannya secara kualitatif.

Nasution (1998:129) penelitian ini menggunakan kualitatif, data yang terkumpul dikelompokkan menurut kebutuhan. Untuk melihat data-data yang bisa mempengaruhi dan berpengaruh terhadap objek yang diteliti, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data yang didapat dari lapangan masih berupa uraian atau laporan yang terperinci yang akan terasa sulit bila tidak direduksi, dirangkum hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting dicari polanya. Jadi laporan lapangan sebagai bahan mentah disingkat, direduksi lebih sistematis sehingga lebih mudah dikendalikan.

2. Display (penyajian) data

Bagian-bagian tertentu pada penelitian dengan menggunakan tabel dan grafik penelitian.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Menarik hasil akhir dari penyajian data dan menguji kebenaran hasil kesimpulan dari penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Political Will

Political Will diartikan sebagai "niatan pimpinan" untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk kebaikan bersama dalam jangka panjang. Terdapat beberapa indikator untuk mengukur *political will*, yaitu inisiatif, prioritas, mobilisasi dukungan politik, penegakan hukum dan keberlanjutan usaha.

1. Inisiatif Pemerintah

Inisiatif berarti adanya suatu tindakan yang berasal dari diri sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak tertentu. Inisiatif dibutuhkan untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap perlu demi kebaikan bersama. Inisiatif pada suatu pemerintahan dapat berupa program real atau kebijakan yang harus dijalankan demi tercapainya suatu tujuan. Inisiatif yang dilakukan tentunya berasal dari pemikiran yang matang dan tidak melanggar segala aturan yang berlaku, karena inisiatif ini jelas merupakan tindakan yang bertujuan baik, bukan suatu alat untuk melakukan tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku. Inisiatif juga haruslah bersifat fleksibel atau mampu menyesuaikan dengan aturan yang sudah ada dan masih berlaku, agar tujuan yang tadinya baik tidak malah akan menimbulkan konflik baru.

2. Prioritas

Maksudnya menjadi prioritaskah suatu program atau kebijakan? Seberapa besar APBD yang di alokasikan? Seberapa banyak kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan program atau kebijakan tersebut? Jika kesemuanya minim maka program atau kebijakan tersebut adalah bukan prioritas. Inisiatif saja tidaklah cukup, namun harus

dibarengi dengan implementasi inisiatif tersebut dengan baik. Jika sudah ada inisiatif maka perlu adanya tindakan lanjut untuk mewujudkan inisiatif tersebut agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diinginkan, misalnya dengan menjadikan inisiatif tersebut sebagai prioritas, agar dari segi waktu dapat terlaksana dengan efisien dan dari segi ketepatan dapat terlaksana dengan akurat.

3. Mobilisasi dukungan politik

Ada tidaknya keinginan politik juga tergantung pada kemauan dan kemampuan untuk menggalang dukungan bagi suatu program atau kebijakan. Program yang dijalankan harus mendapat dukungan dari kekuatan politik lain. Jika tidak ada dukungan, riwayat pemerintah akan singkat karena keburu digantikan pemerintah baru. Tanpa dukungan politik juga bisa menjadikan. Artinya semua pihak, dilingkungan eksekutif maupun legislatif harus turut mendukung program atau suatu kebijakan.

4. Penegakan hukum

Penegakan hukum berupa sanksi yang tegas dan adil juga menjadi penentu akan komitmen pemerintah. Jika hukum yang tegas dan adil tidak ditegakkan maka ini merupakan indikasi dari komitmen setengah hati pemerintah. Hal ini dikarenakan jika hukuman yang diberikan kepada para pelanggar relatif ringan maka tidak akan menimbulkan efek jera sehingga akan dengan mudah muncul pelanggaran-pelanggaran baru dengan kasus yang bermacam-macam. Selain itu penindakan dengan tebang pilih juga akan mempersulit penegakan hukum. Apalagi jika hukum sudah dapat diperjual belikan, maka yang memiliki “kantong tebal” maka akan kebal hukum, hal ini jelas bukanlah perbuatan yang adil.

5. Keberlanjutan usaha

Usaha yang dilakukan hanya sebatas satu atau dua episode merupakan ciri dari keinginan politik yang lemah dan / atau goyah. Misalnya ada program “menjaga

lingkungan” yang hanya sampai pada saat kampanye, visi dan misi kepala daerah saja. Ada juga yang sampai pada tahap inisiatif, dan mandeg diprioritas sehingga sulit mengharapkan keberlanjutannya. Terlebih jika tujuannya hanya untuk pencitraan seolah berpihak pada lingkungan, padahal diwaktu yang sama melakukan politik pembiaran dan menikmati hasilnya. Jadi suatu inisiatif yang baik bukan hanya memikirkan untuk jangka pendek tapi juga untuk dampak masa panjang.

3.2 *Political Will* Pemerintah Kabupaten Pelalawan Terhadap Pelestarian Satwa di Taman Nasional Tesso Nilo Tahun 2011-2012.

Seperti yang telah dijelaskan pada BAB sebelumnya, bahwa Taman Nasional Tesso Nilo ditetapkan sebagai Taman Nasional pada tanggal 19 Juli 2004 berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 255/Menhut-II/2004 Tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kelompok Hutan Tesso Nilo yang Terletak di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu Provinsi Riau Seluas 38.575 (Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam) Hektar Menjadi Taman Nasional Tesso Nilo dan didalam Surat Keputusan Menteri nomor 225 tahun 2004 tersebut memerintahkan kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam untuk melakukan pengelolaan atas Taman Nasional Tesso Nilo. Balai Taman Nasional adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis di bawah Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Jadi segala urusan atau kepentingan yang berkaitan dengan Taman Nasional Tesso Nilo adalah merupakan tanggung jawab atau kewenangan dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Untuk itu meskipun kawasan Taman Nasional Tesso Nilo terletak di Kabupaten Pelalawan, pemerintah Kabupaten Pelalawan tidak memiliki kewenangan atas Taman Nasional Tesso Nilo. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Presiden Republik Indonesia

pada Pasal 35 yang berbunyi Pengelolaan Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam, dilakukan oleh Pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berarti Pemerintah Pusat yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 255/Menhut-II/2004 yang memerintahkan kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam untuk melakukan pengelolaan atas Taman Nasional Tesso Nilo.

Political will Pemerintah Kabupaten Pelalawan terhadap Pelestarian Satwa di Taman Nasional Tesso Nilo penulis membahasnya dalam beberapa indikator antara lain :

3.2.1 Inisiatif Pemerintah Kabupaten Pelalawan Terhadap Pelestarian Satwa di Taman Nasional Tesso Nilo

Sejauh mana inisiatif pemerintah daerah provinsi kabupaten melalui berbagai program realnya untuk menjaga lingkungan hidup. Namun menurut jawaban dari informan pemda Kab.Pelalawan tidak memiliki program real atau program khusus terkait TNTN. Pemda Pelalawan hanya berkoordinasi dengan pusat atau pihak Balai TNTN, itupun ketika hanya ada kegiatan tertentu saja. Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan Bapak H. Ilyas L,Amd yang menuturkan :

“Karena peraturan dan segala hal yang berkaitan dengan tesso nilo adalah kewenangan langsung dari pusat, maka kami didaerah tidak memiliki peraturan khusus untuk mengelola tesso nilo”

Hal senada juga dituturkan oleh Bapak Ir. Ibrahim selaku Kepala Bagian Persidangan dan Risalah DPRD Pelalawan berikut ini:

“Kami tidak pernah merancang atau membuat suatu peraturan terkait

tesso nilo, karena memang tesso nilo adalah wewenang pusat, bukan wewenang kami di daerah”

Dari beberapa penjelasan yang disampaikan oleh para informan tentang pengelolaan Taman Nasional Tesso Nilo, penulis dapat melihat bahwa tidak adanya *political will* Pemerintah Kabupaten Pelalawan pelestarian satwa di Taman Nasional Tesso Nilo.

Memang benar adanya bahwa Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat yakni Kementerian Kehutanan untuk melakukan pengelolaan atas Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), namun Pemerintah Kabupaten Pelalawan juga harus turut berperan aktif sebagai wujud *political will* nya dalam pelestarian satwa di TNTN. Sesuai dengan salah satu Misi yaitu “Mensinergikan para pihak dalam pengelolaan TNTN” dan salah satu Visi TNTN 2020 yaitu “Terwujudnya Taman Nasional Tesso Nilo yang memiliki fungsi optimal yang dikelola secara partisipatif menuju masyarakat sejahtera”, TNTN membuka kesempatan untuk pihak manapun dalam pengelolaan kolaborasi TNTN.

3.2.2 Prioritas Pemerintah Kabupaten Pelalawan Terhadap Pelestarian Satwa di Taman Nasional Tesso Nilo

Jika melihat dari 7 program prioritas Pembangunan Kabupaten Pelalawan yaitu antara lain : Pelalawan Sehat, Pelalawan Cerdas, Pelalawan Terang, Pelalawan Lancar dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa / Kelurahan, Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Perkebunan, Pengembangan Objek Wisata Bono dan Program Pembangunan Kawasan Teknopolitan Pelalawan, tidak tersirat prioritas untuk pelestarian satwa di TNTN. Mengenai anggaran juga tidak ada anggaran khusus yang disediakan oleh Pemda Pelalawan untuk TNTN, serta program yang

dilakukan juga hanya sebatas koordinasi dengan pemerintah pusat.

Kasus kematian satwa di kawasan TNTN banyak disebabkan oleh rusaknya hutan yang menjadi habitat satwa. Upaya yang telah dilakukan Pemda Kabupaten Pelalawan untuk melindungi habitat satwa di TNTN antara lain, didalam Rencana Tata Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun 2005-2015 menjelaskan kawasan lindung didalam Kepres No.32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Taman Nasional Tesso Nilo, namun dilapangan bahwa keseluruhan areal perkebunan kelapa sawit, karet dan sebagainya sektor Pelalawan berada di atas kawasan lindung. Kemudian bertentangan Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2002 Tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan dan penggunaan kawasan hutan, seharusnya usaha pemanfaatan perkebunan pada hutan tanaman dilaksanakan pada lahan kosong, padang alang-alang dan atau semak belukar di hutan produksi. Dapat disimpulkan bahwa terjadi pelanggaran terhadap upaya pengendalian konversi kawasan lindung TNTN di Kabupaten Pelalawan yang belum maksimal.

Upaya lain yang dilakukan adalah adanya areal untuk perluasan kawasan lindung TNTN sekitar 100.000 Ha yang terletak di kawasan hutan milik PT. Nanjak Makmur, PT. Siak Raya Timber, PT. Hutani Sola Lestari. Namun areal ini maupun sekitarnya telah terjadi kegiatan perambahan hutan. Luas perambahan terjadi hingga tahun 2007 adalah TN Tesso Nilo (8.427 Ha), PT. Nanjak Makmur (7.198 Ha), PT. Siak Raya Timber (12.374 Ha), dan PT. Hutani Sola Lestari (6.806 Ha). Kegiatan perambahan dan konversi yang terjadi mengakibatkan kerusakan lahan pada kawasan lindung TN Tesso Nilo dan sekitarnya di Kabupaten Pelalawan sudah sangat mengkhawatirkan, kegiatan deforestasi, degradasi pemanfaatan lahan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada di pinggiran kawasan, tetapi juga di kawasan perkebunan, daerah transmigrasi dan pedalaman. Kondisi permasalahan tersebut perlu diadakannya arahan pengendalian penggunaan kawasan

lindung guna meminimalkan konversi baik bersifat Prefentif maupun bersifat kuratif dan memberikan arahan yang efektif dari pengendalian yang telah ada.

Kerjasama yang dilakukan WWF beserta *stakeholder* diantaranya BKSDA provinsi Riau, Pemda Provinsi Riau dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Pemda Kabupaten dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, masyarakat setempat dan berbagai perusahaan yang beroperasi di daerah terkait adalah melakukan upaya advokasi yang ditujukan kepada perusahaan-perusahaan besar seperti RAPP, para cukong besar, elit masyarakat, pejabat pemerintah daerah yang memberikan izin dan sebagian masyarakat dari desa terdekat atau para pendatang yang melakukan perambahan, melakukan monitoring, penelitian dan evaluasi, serta menjadi fasilitas/mediator komunikasi ke atas di TNTN berupa dialog antara masyarakat dan perusahaan yang berada diwilayah TNTN.

3.2.3 Mobilisasi Dukungan Politik Pemerintah Kabupaten Pelalawan Terhadap Pelestarian Satwa di Taman Nasional Tesso Nilo

Semua pihak dilingkungan eksekutif maupun legislatif harus turut mendukung program atau suatu kebijakan. Namun yang penulis dapatkan dari hasil wawancara adalah program atau kebijakan yang sengaja dibuat oleh Pemda Kabupaten Pelalawan untuk pelestarian satwa di TNTN belum ada. Pemerintah Kabupaten Pelalawan masih berfokus pada 7 Program Prioritas Pembangunan yang sedang gencar digalakan. Pembangunan yang digalakkan tidak semestinya menafikan akan keberadaan dan daya tahan serta fungsi lingkungan hidup sebagai tempat hidup satwa langka. Artinya, pembangunan harus tetap berjalan dengan tidak melupakan pengelolaan lingkungan hidup. Sedangkan, pengelolaan lingkungan hidup tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Pemda Kabupaten Pelalawan harus bisa jeli melihat hal ini, terlebih kawasan TNTN berada di daerah Kabupaten Pelalawan.

Masalah pendanaan TNTN bukanlah menjadi urusan wajib Pemda Pelalawan, namun apabila Pemda Pelalawan berinisiatif untuk turut serta berkolaborasi dengan pihak terkait mengenai pendanaan, ini adalah salah satu wujud *political will* Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan terhadap pelestarian satwa di TNTN.

3.2.4 *Political Will* Pemerintah Kabupaten Pelalawan Terhadap Pelestarian Satwa di Taman Nasional Tesso Nilo dari segi Penegakan Hukum

Sumber Daya Alam Hewani yang dilindungi. Namun yang terjadi perambahan hutan masih terjadi, kematian satwa masih ditemukan hal ini mengindikasikan penegakan hukum yang masih belum menyentuh kata berhasil untuk upaya pelestarian satwa di TNTN.

Dari data yang berhasil dikumpulkan penulis, sanksi yang diberikan oleh aparat penegak hukum terhadap para perusak habitat satwa dan pemburu satwa masih tergolong ringan, yakni mulai dari peringatan lisan dan tertulis hingga kurungan penjara, kasus pembakaran lahan terakhir Pengadilan Tinggi Pelalawan hanya memberikan sanksi 2,5 tahun penjara kepada pelaku. Mengingat Negara Republik Indonesia adalah negara berdasar atas hukum, maka pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya perlu diberi dasar hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi usaha pengelolaan tersebut.

Dewasa ini kenyataan menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang bersifat nasional belum ada. Peraturan perundang-undangan warisan pemerintah kolonial yang beranekaragam coraknya, sudah tidak sesuai

lagi dengan tingkat perkembangan hukum dan kebutuhan bangsa Indonesia. Perubahan-perubahan yang menyangkut aspek-aspek pemerintahan, perkembangan kependudukan, ilmu pengetahuan, dan tuntutan keberhasilan pembangunan pada saat ini menghendaki peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang bersifat nasional sesuai dengan aspirasi bangsa Indonesia. Upaya pemanfaatan secara lestari sebagai salah satu aspek konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, belum sepenuhnya dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

Demikian pula pengelolaan kawasan pelestarian alam dalam bentuk taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, yang menyatukan fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari. Permasalahan hukum yang timbul disebabkan lemahnya peranan pemerintah dalam melihat masalah di lapangan dan disebabkan juga kebijakan yang diberlakukan. Pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah sering mengeluarkan kebijakan yang membuat benturan-benturan antara sesama masyarakat maupun masyarakat dengan balai TNTN dan perusahaan. Salah satu contoh kasus adalah pemekaran Dusun Bagan Limau menjadi desa bagan limau berdasarkan Perda Kabupaten Pelalawan No.11 tahun 2007 dimana 95% atau 11.846,5 ha merupakan wilayah TNTN. Aktor pemerintah sering terlibat di dalamnya seperti perangkat desa ataupun camat sesuai dengan hasil penyelidikan polisi kehutanan balai TNTN.

Selain itu, masalah pembunuhan gajah juga merupakan persoalan yang harus di perhatikan, karena gajah adalah salah satu binatang yang di lindungi dan di ambang kepunahan di TNTN. Belum adanya hukum pidana yang kuat dalam menghukum pihak yang berperan membunuh dan mengambil gading gajah di TNTN. Masalah tumpang tindih wilayah juga menjadi persoalan yang menyebabkan ketidakpuasan masyarakat

terhadap aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum terkadang juga tidak berani mengambil keputusan tegas dalam menindak kesalahan yang terjadi, mereka seolah lepas tangan dari permasalahan yang terjadi.

Akibat dari masih lemahnya penegakkan hukum di kawasan TNTN, muncul beberapa pelanggaran-pelanggaran yang menjadi penyebab kerusakan hutan dan mengancam hidup satwa didalamnya.

1. Pembalakan Liar

Pembalakan liar terjadi hampir diseluruh wilayah di dalam hutan Tesso Nilo. Hal tersebut dipicu oleh kondisi ekonomi masyarakat di sekitar hutan serta kebutuhan akan kayu yang demikian tinggi, ditambah lagi adanya akses ke dalam hutan yang sudah cukup lancar dengan dibangunnya koridor-koridor jalan di dalam hutan oleh bekas HPH dan perusahaan-perusahaan besar seperti RAPP. Pengawasan yang lemah dari instansi pemerintah di bidang ini juga menyebabkan aktivitas pembalakan liar dapat berlangsung dengan leluasa.

2. Perambahan

Perambahan adalah penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan secara tidak sah. Dampak langsung dan tidak langsung perambahan di TNTN lebih luas dibanding pembalakan liar seperti perubahan ekosistem hutan menjadi kebun sawit, penurunan tingkat keragaman jenis flora, penurunan populasi fauna dan flora, dan banjir di sejumlah tempat. Perambahan juga telah mempersempit habitat fauna, terutama gajah dan harimau Sumatera sehingga meningkatkan intensitas konflik manusia-satwa liar.

3. Konflik Satwa dengan masyarakat

Konflik lain yang terjadi antara masyarakat dengan Balai Taman Nasional Tesso Nilo disebabkan masyarakat sering membunuh gajah di wilayah konservasi TNTN. Masyarakat menganggap gajah sebagai hama dan sering merusak perkebunan mereka sementara gajah di Taman Nasional

Tesso Nilo. Seperti yang diungkapkan Fauzan Kahfi saat penulis mewawancarainya :

“adanya motif gajah dianggap sebagai hama adalah merupakan salah satu masalah yang ada di TNTN yang sampai sekarang masih sulit teratasi”

Selain akibat motif gajah dianggap sebagai hama, perburuan gading gajah juga merupakan salah satu penyebab terus berkurangnya populasi gajah di TNTN. Hal ini penulis temukan dari hasil wawancara dengan Bapak Fauzan Kahfi:

“beberapa penyebab berkurangnya populasi gajah di kawasan TNTN antara lain perburuan gading gajah, berkurangnya habitat, dan adanya motif gajah dianggap hama...”

3.2.5 Keberlanjutan usaha Political Will Pemerintah Kabupaten Pelalawan Terhadap Pelestarian Satwa di Taman Nasional Tesso Nilo

Usaha yang dilakukan hanya sebatas satu atau dua episode merupakan ciri dari keinginan politik yang lemah dan / atau goyah. Hal ini sesuai dengan yang penulis dapatkan dari pernyataan informan yang menyebutkan bahwa Pemda hanya bekerja ketika ada even tertentu saja, setelah even atau kegiatan itu usai maka Pemda akan kembali ke urusannya semula. Hal ini juga penulis dapatkan dari informan yaitu Bapak Fauzan Kahfi yang menyatakan :

“belum adanya pembagian peran dan pemda hanya “bekerja” ketika ada event tertentu saja, setelah itu pemda kembali focus pada urusannya sendiri”

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa Upaya yang telah dilakukan Pemda Kabupaten Pelalawan untuk melindungi habitat satwa di TNTN antara lain, didalam Rencana Tata Ruang Kabupaten Pelalawan Tahun 2005-2015. Namun implementasinya masih belum berjalan dengan baik, banyak ditemukan kejanggalan-kejanggalan dalam

pelaksanaanya. Misalnya saja bertentangan Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2002 Tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan dan penggunaan kawasan hutan, seharusnya usaha pemanfaatan perkebunan pada hutan tanaman dilaksanakan pada lahan kosong, padang alang-alang dan atau semak belukar di hutan produksi tapi dilapangan bahwa keseluruhan areal perkebunan kelapa sawit, karet dan sebagainya sektor Pelalawan berada di atas kawasan lindung. Hal ini menegaskan bahwa belum maksimalnya usaha jangka panjang yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Pelalawan terhadap pelestarian satwa.

3.3 Hambatan Pelestarian Satwa di Taman Nasional Tesso Nilo

Hambatan Anggaran

Dalam melakukan suatu program apapun bentuknya pasti akan mengalami hambatan. Tidak terkecuali dengan hambatan pelestarian satwa di taman Nasional Tesso Nilo. Dalam prakteknya upaya pelestarian satwa di TNTN masih berjalan belum optimal dengan masih ditemukannya beberapa kasus kematian satwa di kawasan TNTN. Adapun yang menjadi hambatan dalam pelestarian satwa di TNTN antara lain:

1. Kurangnya *Political will* Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

Untuk melakukan pelestarian satwa di TNTN seharusnya semua pihak bisa bekerja sama serta berkolaborasi, terutama Pemda Kabupaten Pelalawan. Memang kewenangan TNTN adalah milik pusat namun jika Pemda Pelalawan memiliki keinginan untuk berperan aktif juga, tanpa harus menunggu untuk berkoordinasi dengan pusat atau hanya sebatas partisipatif saja. Seperti yang diungkapkan Bapak Ir. Ibrahim kepada penulis berikut:

“kewenangan tesso nilo memang dari pusat, tapi tidak ada salahnya pemda pelalawan juga turut serta mengurus tesso nilo, semua tergantung pada political will

pemerintah daerah, jika tidak ada pasti akan sulit”

2. Kurangnya kesadaran dari semua pihak bahwa satwa memiliki hak untuk hidup.

Manusia selalu menempuh cara apapun demi mendapatkan keuntungan diri sendiri termasuk mengabaikan lingkungan serta satwa yang hidup didalamnya. Manusia tidak segan untuk merusak hutan yang menjadi habitat satwa untuk kepentingan hidupnya. Ditambah lagi dengan anggapan masyarakat bahwa gajah adalah hama semakin menyudutkan hak hidup bagi satwa. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Fauzan Kahfi yang menyatakan:

“kurangnya kesadaran dari semua pihak bahwa satwa memiliki hak untuk hidup, manusia sering kali mengacuhkan keselamatan alam beserta isinya demi kepentingan pribadinya saja”

3. Pengamanan kawasan yang masih belum maksimal

Beberapa penyebab dilapangan menjadi faktor belum maksimalnya pengamanan kawasan TNTN, misalnya kurangnya sarana dan prasarana, serta kurangnya jumlah personil untuk pengamanan. Seperti yang diungkap oleh Bapak Hamdi selaku anggota pengamanan kawasan TNTN:

“Untuk personil pengamanan masih dirasa kurang, karena untuk mengamankan kawasan dengan luas 8300 ha hanya ada sekitar 20 personil, itupun tidak setiap hari personil lengkap berada dilapangan. Jadi dapat dihitung untuk 1 personil memiliki tanggung jawab mengamankan kawasan sekitar 414 ha, jadi memang sulit dan sering tidak semua lokasi ter-cover dengan maksimal”

4. Kurangnya support dari masyarakat sekitar

Banyak kasus kematian satwa serta rusaknya habitat yang terjadi akibat ulah dari masyarakat di sekitar TNTN. Hal ini menunjukkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam berperan mendukung pelestarian habitat dan satwa TNTN. Demikian pula yang disampaikan oleh Bapak Fauzan kepada penulis:

“masyarakat atau oknum-oknum manapun yang melakukan kerusakan di TNTN harus sadar diri, bahwa sebenarnya manusia dan alam harus bisa hidup berdampingan, karena manusia pasti membutuhkan alam untuk hidup. Oknum-oknum maupun masyarakat mau turut serta, atau minimal tidak mengganggu kehidupan satwa dan habitatnya”

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang diuraikan penulis, peneliti mengambil kesimpulannya yaitu *Political Will* Pemerintah Kabupaten Pelalawan terhadap pelestarian satwa di TNTN tahun 2011-2012 masih sangat kurang bahkan hampir tidak ada. Terdapat beberapa indikator yang penulis jadikan sebagai acuan untuk menemukan *political will* Pemerintah Kabupaten Pelalawan terhadap pelestarian satwa di TNTN tahun 2011-2012 yaitu, inisiatif pemerintah daerah provinsi kabupaten melalui berbagai program realnya untuk menjaga lingkungan hidup, namun Pemda Pelalawan tidak memiliki program real atau program khusus terkait TNTN. Pemda Pelalawan hanya berkoordinasi dengan pusat atau pihak Balai TNTN itupun ketika hanya ada kegiatan tertentu saja. Koordinasi yang dilakukan meskipun belum maksimal sudah ada namun untuk inisiatif yang dilakukan belum ada. Dari segi prioritas, tidak tersirat prioritas untuk pelestarian satwa di TNTN. Mengenai

anggaran juga tidak ada anggaran khusus yang disediakan oleh Pemda Pelalawan untuk TNTN, serta program yang dilakukan juga hanya sebatas koordinasi dengan pemerintah pusat. Dilihat dari mobilisasi dukungan, program atau kebijakan yang sengaja dibuat oleh Pemda Kabupaten Pelalawan untuk pelestarian satwa di TNTN belum ada. Pemerintah Kabupaten Pelalawan masih berfokus pada 7 Program Prioritas Pembangunan yang sedang gencar digalakan. Masing-masing kekuatan politik belum saling mendukung untuk melakukan upaya pelestarian satwa di TNTN. Selanjutnya dari sisi penegakan hukum, perambahan hutan masih terjadi, kematian satwa masih ditemukan hal ini mengindikasikan penegakan hukum yang masih belum menyentuh kata berhasil untuk upaya pelestarian satwa di TNTN. Selanjutnya untuk keberlanjutan usaha, Pemda hanya bekerja ketika ada even tertentu saja, setelah even atau kegiatan itu usai maka Pemda akan kembali ke urusannya semula.

Terdapat beberapa faktor penghambat di dalam upaya pelestarian satwa di TNTN antara lain:

1. Kurangnya *Political will* Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
2. Kurangnya kesadaran dari semua pihak bahwa satwa memiliki hak untuk hidup.
3. Kurangnya *support* atau dukungan dari masyarakat sekitar
4. Pengamanan kawasan yang masih belum maksimal

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti menyarankan kepada pihak- pihak yang terkait sebagai bahan masukan sebagai berikut :

1. Pemerintah kabupaten Pelalawan harus memiliki inisiatif dalam turut serta membantu pelestarian satwa di TNTN misalnya dalam bentuk program real atau kebijakan

2. Upaya pelestarian habitat beserta satwa dan seisinya harus dijadikan prioritas, karena alam merupakan penyangga kehidupan masa kini dan untuk masa yang akan datang
3. Semua pihak, terutama para kekuatan politik di daerah harus saling mendukung dalam upaya pelestarian satwa
4. Mengingat Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum maka untuk terwujudnya upaya penyelamatan dan perlindungan terhadap satwa yang dilindungi perlu dilakukan penegakan hukum secara tegas dengan membentuk team terpadu yang terdiri dari instansi terkait, hal dimaksud orientasinya adalah dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku-pelaku
5. Inisiatif yang sudah muncul jangan sampai berhenti ditengah jalan namun harus terus diperjuangkan hingga mencapai tujuan yang diinginkan, apalagi sampai sekedar pencitraan semata.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

Agus Setiawan dan Hadis Alikodra. Tinjauan Terhadap Pembangunan Kawasan Konservasi di Indonesia. *Media Konservasi* Vol. VII, No. 2, Juni 2001 : 39 – 46

Eva Yeni Hutabalian. Peranan World Wide Fund for Nature (WWF) dalam Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). *Jurnal Penelitian*. Volume 1 No. 2-Oktober 2014. Hlm 2-10.

Buku :

Beddy, Iriawan Maksudi.2012. *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik*. Jakarta: Rajawali Pers

C.S.T Kansil.2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara

J.M Papasi, 2010, *Ilmu Politik Teori dan Praktik*, Graha Ilmu: Yogyakarta

Prof. Dr. Emzir, M.Pd.2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Press

Sarafino, Edward P. 2006. *Health Psychology: Biopsychosocial Interactions*. Universitas Michigan: John Wiley

Supriatna, Jatna. 2008. *Melestarikan Alam Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Toni Andrianus Pito dkk, 2006. *Mengenal Teori-teori Politik*, Nuansa: Bandung

Widodo. 2012 *Cerdik Menyusun Proposal Penelitian*. Jakarta: Magnascript Publishing

Peraturan Perundang Undangan:

Kepres No.32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Taman Nasional Tesso Nilo,

Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2002 Tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan dan penggunaan kawasan hutan

Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 255 tahun 2004 yang isinya menunjuk kawasan hutan Tesso Nilo sebagai kawasan taman nasional dengan nama Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN)

Undang Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Sumber Lain : Artikel, internet, laporan ilmiah

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Riau

Brinkerhoff, D. (2010) Unpacking the Concept of Political Will

Buletin Wild Suara Tesso Nilo

Dugis, Vinsensio, 2012. Identifikasi National Power, materi disampaikan pada kuliah Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Departemen Hubungan Internasional, Universitas Airlangga. 15 Oktober 2012.

<http://agnesdavonar.gerychocolatos.com/?p=706>

<http://agnesdavonar.gerychocolatos.com/?p=706>

<http://energitoday.com/2012/12/28/gajah-sumatera-terancam-punah/>

<http://energitoday.com/2012/12/28/gajah-sumatera-terancam-punah/>

<http://natuna.org/peraturan-perundang-undangan-perlindungan-satwa-langka.html>

<http://www.attayaya.net/2011/08/program-wilayah-konservasi-tesso-nilo.html>

<http://www.attayaya.net/2013/07/taman-nasional-tesso-nilo.html>

<http://www.wwf.or.id/?26180/Delapan-Ekor-Gajah-Mati-di-Tesso-Nilo>

Imam Pramono Political Will : Sebuah Pandangan dari Sebuah Sudut

Makalah tentang Penyelamatan dan Perlindungan Satwa yang dilindungi di Propinsi Riau. Dalam Upaya Penegakan Hukum

Reby Oktarianda, Suwondo, Yustina. Analisis Komunitas Burung Pada Berbagai Tipe Habitat di Taman Nasional Tesso Nilo Sebagai Sumber Belajar Dalam Mendukung Praktikum Konsep Komunitas Hewan.

Pelalawan dalam angka 2013. Badan pusat Statistik Kabupaten Pelalawan.